



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ARIEF S. TRINUGROHO
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. Drs. A. FATONI, M.Si
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2024

Pihak Kedua,

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

Pihak Kesatu,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ARIEF S. TRINUGROHO
PEMBINA UTAMA
NIP 196411271990031002

LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD)	2,7 Nilai/Skor
2	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Persentase kerjasama yang difasilitasi	100%
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif	Kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	75%
		Proposal permohonan belanja hibah yang ditindaklanjuti	75%
4	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu	1190 Produk hukum
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan	40 Produk hukum
5	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat	Jumlah Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan	25 perkara
		Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM	15 Kasus/Masalah
6	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan Kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100%
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	50%
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	100%
7	Mewujudkan proses dan pelayanan/layanan pengadaan secara elektronik yang transparan, akuntabel dan terstandar	Persentase pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%
		Persentase pemenuhan 17 standarisasi LPSE	100%
8	Menciptakan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah kebijakan yang di tetapkan untuk pengendalian administrasi pelaksanaan Daerah	20 Kebijakan
		Persentase realisasi fisik dan non fisik perangkat daerah yang menyampaikan laporan melalui aplikasi	95 %

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
9	Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Indeks Pelayanan Publik	4,35 (A-)
		Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%
		Nilai capaian pelaporan kinerja	11,75
10	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan	100%
11	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	Persentase kontribusi PAD dari pemanfaatan pelayanan gedung dan Mess Pemprov	100%
12	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Materi Pimpinan	100%
		Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 357.228.221.181	P.APBD
2 Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp 3.285.360.147	P.APBD
3 Kesejahteraan Rakyat	Rp 471.655.453.205	P.APBD
4 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Rp 2.038.773.551	P.APBD
5 Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.128.757.142	P.APBD
6 Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 12.192.069.790	P.APBD
7 Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp 1.258.815.785	P.APBD
8 Penataan Organisasi	Rp 2.297.286.101	P.APBD
TOTAL	Rp 851.084.736.902	

Medan,

2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ARIEF S. TRINUGROHO
PEMBINA UTAMA
NIP 196411271990031002